

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

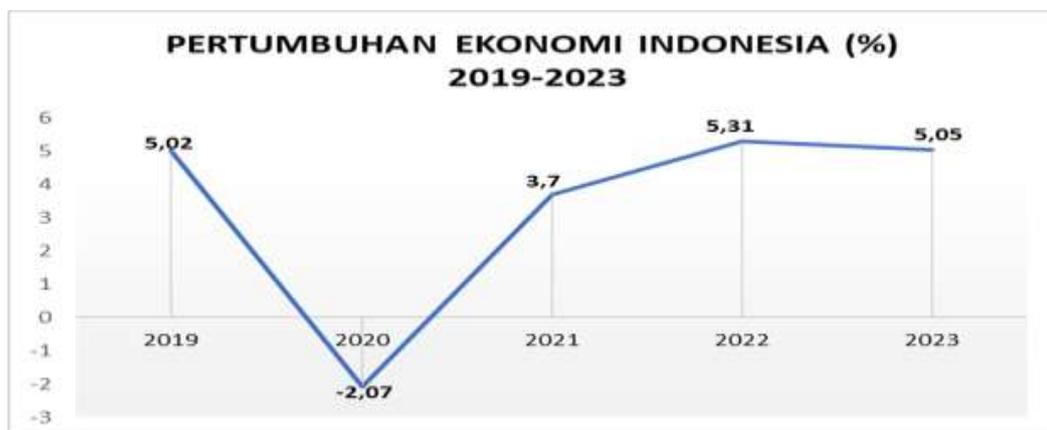
Suatu upaya dalam memajukan kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera disebut pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu kegiatan dalam melakukan perubahan kondisi suatu wilayah yang mengarah kepada kondisi yang semakin baik dalam waktu tertentu yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Arihaha *et al.*, 2019). Pertumbuhan ekonomi merupakan istilah menjelaskan atau menganalisis prestasi dari peningkatan ekonomi. Istilah umum yang mencerminkan tingkat kemajuan suatu negara, yang diukur berdasarkan peningkatan pendapatan riil bisa dilihat melalui pertumbuhan (Sukirno, 2019). Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang tercatat setiap tahunnya digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut adalah laju pertumbuhan ekonomi. Suatu wilayah dikatakan berhasil secara ekonomi jika bisa konsisten dalam mempertahankan ekonomi yang stabil dan positif dalam jangka panjang, ketika suatu wilayah terjadi kenaikan dalam menghasilkan barang dan jasa dari tahun sebelumnya, artinya perekonomian di wilayah tersebut dapat dikatakan mengalami pertumbuhan (Sukirno, 2015 dalam Padang & Murtala, 2020).

Persoalan ekonomi jangka panjang yang menjadi fenomena penting yang dalam waktu terakhir ini dialami oleh dunia yaitu pertumbuhan ekonomi. *Modern Economic Growth* disebut sebagai proses pertumbuhan ekonomi. Secara luas, pertumbuhan ekonomi mengarah pada peningkatan *output* perkapita yang berlangsung dalam jangka panjang. Maka kondisi sejahtera masyarakat dalam jangka panjang dapat diukur dari peningkatan *output* perkapita dimana ketika *output* perkapita meningkat, maka masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Peningkatan perkapita juga diikuti dengan daya beli yang terus meningkat, memperlihatkan bahwa perekonomian yang tumbuh mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang konsisten melakukan pembangunan yang telah disusun secara sistematis juga bertahap dengan tidak mengabaikan upaya pemerataan serta stabilitas, tujuan dari pembangunan nasional adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, maka ketika tujuan itu terwujud maka negara-negara berkembang mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat (Amdan & Sanjani, 2023).

Selain aspek pertumbuhan, pembangunan juga mencakup perbaikan kesejahteraan, stabilitas, keadilan, serta peningkatan esensi sumber daya, baik manusia (SDM) maupun alam (SDA). Salah satu komponen penting menjadi pelaku pembangunan dalam perekonomian atau bidang lainnya di suatu wilayah yaitu sumber daya manusia (Imanto *et al.*, 2020). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat sangat dibutuhkan agar tidak memperlambat transformasi struktur perekonomian daerah menuju kondisi yang lebih seimbang dan dinamis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, idealnya pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan pola peningkatan di setiap tahunnya (Hodge, 2018). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu wilayah seharusnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Namun, kenyataannya, dinegara berkembang seperti Indonesia, manfaat tersebut tidak secara otomatis dapat dirasakan oleh semua masyarakat (Imanto *et al.*, 2020). Berikut ini adalah angka pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019-2023



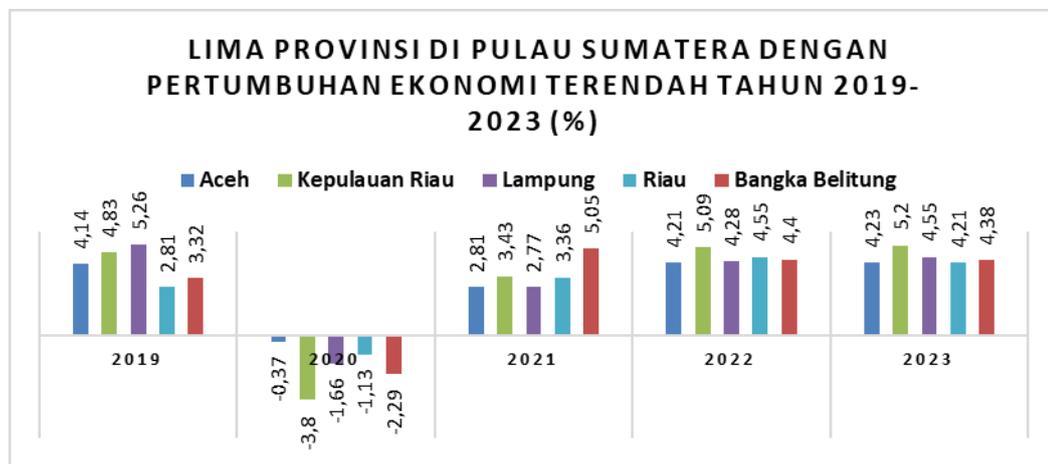
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Gambar 1.1 menampilkan kurva pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2019-202. Grafik ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data tercatat sebesar 5,02%. Sementara pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam hingga mencapai minus 2,07%, yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Pandemi tersebut memicu guncangan besar dalam perekonomian nasional, sehingga tahun tersebut menjadi salah satu yang terburuk. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,7% pada tahun 2021 dan mencapai 5,31% pada tahun 2022, menunjukkan adanya tren pemulihan yang positif. Namun, Pada tahun 2023, meskipun pertumbuhan ekonomi sedikit terjadi penurunan menjadi 5,05% namun masih dalam kategori positif dan menunjukkan stabilitas perekonomian Indonesia, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang bervariasi yaitu sebesar 3,4%

Pulau Sumatera, salah satu pulau terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dan menempati urutan keenam sebagai pulau terbesar secara global. Selain itu, Pulau Sumatera juga berperan penting sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional setelah Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera mencapai 45,5%. Secara administratif, Pulau Sumatera terdiri dari sepuluh provinsi. Namun, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada lima provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, dan Bangka Belitung, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi terendah berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir. Pemilihan periode lima tahun bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih stabil mengenai tren pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi tersebut, mengurangi pengaruh fluktuasi tahunan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal maupun peristiwa ekonomi yang bersifat sementara. Dengan menghitung rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir, ditargetkan bisa diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi ekonomi yang sesungguhnya, tanpa terpengaruh

oleh data yang mungkin dipengaruhi oleh kejadian tertentu dalam satu tahun. Maka dari itu, ketimpangan ini menarik untuk dianalisis serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan pembangunan ekonomi regional. Berikut adalah data yang menggambarkan dinamika ekonomi lima Provinsi Pulau Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi terendah dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi lima provinsi di Pulau Sumatera 2019-2023



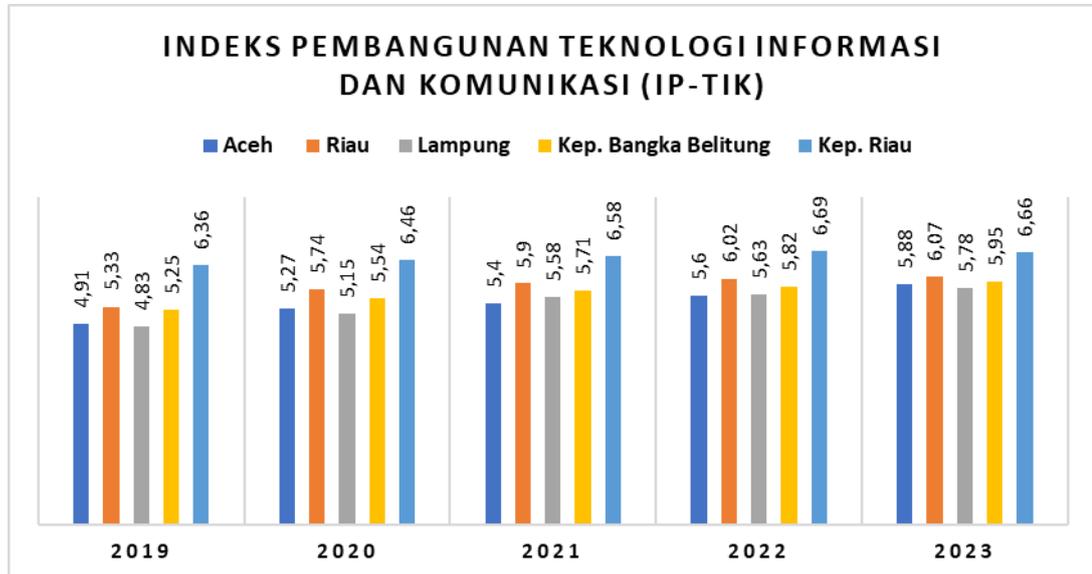
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan grafik pertumbuhan ekonomi pada lima provinsi yang berada di Pulau Sumatera secara keseluruhan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir 2019-2023. Setiap provinsi selalu mengalami pertumbuhan ekonomi yang berubah-ubah karena tidak sedikitnya faktor penentu naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Perubahan dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori ekonomi pembangunan diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu Teori Solow-Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki ketergantungan terhadap akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi, maka berdasarkan teori tersebut penulis meneliti faktor Indeks Pembangunan Teknologi Informasi (IP-TIK) dan Komunikasi, Tingkat Pengangguran Terbuka yang di proksi sebagai tenaga kerja dan Investasi (PMDN & PMA).

Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membiasakan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bagi negara-negara berkembang, pemanfaatan internet atau teknologi informasi menjadi salah satu alternatif solusi dalam mengatasi kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan oleh karakteristik teknologi informasi yang mampu menembus batas-batas geografis, sehingga akses pengetahuan dan informasi bisa dinikmati secara lebih merata oleh berbagai lapisan masyarakat, tanpa terikat oleh lokasi wilayah (R. E. Saputra et al., 2021).

Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas, menyatakan pada 18 November 2021 bahwa penguasaan teknologi serta kualitas dan produktivitas sumber daya manusia merupakan kunci bagi Indonesia agar menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi (*PPN: SDM Iptek Berkualitas Dan Menguasai Teknologi Bawa Indonesia Maju*, 2021). Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mempermudah berbagai aktivitas masyarakat, seperti penerapan e-Government dalam pemerintahan, e-Learning dan e-Resources di bidang pendidikan, e-Commerce untuk transaksi jual beli, serta digitalisasi layanan kesehatan. Tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), yang merupakan standar pengukuran internasional yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dengan nama ICT Development Index (ICT-DI). IP-TIK memungkinkan perbandingan antarwilayah dan antarwaktu, serta mengukur pertumbuhan, kesenjangan digital, dan potensi pengembangan TIK di suatu wilayah (*Indeks Pembnagunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 2022). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Baihaqi & Rahmi, 2024) IP-TIK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan artian ketika IP-TIK meningkat 1% maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% begitu juga sebaliknya namun berbeda dengan hasil temuan yang dilaksanakan oleh (Olivia Theophilia & Riko Setya Wijaya, 2023) IP-TIK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (IP-TIK) 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Gambar 1.3 menyajikan data perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) di lima provinsi wilayah Sumatera, yaitu Aceh, Riau, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau (Kepri) selama periode 2019 hingga 2023. Secara umum, terlihat adanya tren peningkatan IP-TIK di seluruh provinsi tersebut dari tahun ke tahun, yang mencerminkan kemajuan dalam akses, penggunaan, dan keterampilan teknologi informasi di masing-masing wilayah. Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten mencatatkan nilai IP-TIK tertinggi di antara lima provinsi yang ditampilkan, dengan angka mencapai 6,66 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kepri memiliki pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan TIK yang relatif lebih maju. Sebaliknya, Provinsi Aceh secara konsisten mencatatkan angka IP-TIK terendah dalam periode yang sama, meskipun tetap menunjukkan peningkatan dari 4,91 di tahun 2019 menjadi 5,88 pada tahun 2023. Peningkatan yang cukup signifikan juga terlihat di provinsi lain, seperti Lampung dan Bangka Belitung, yang mengalami pertumbuhan IP-TIK stabil dari tahun ke tahun. Data ini memperlihatkan bahwa pembangunan TIK di kawasan Sumatera terus mengalami perkembangan, meskipun terdapat perbedaan tingkat kemajuan antarprovinsi. Perbedaan ini bisa

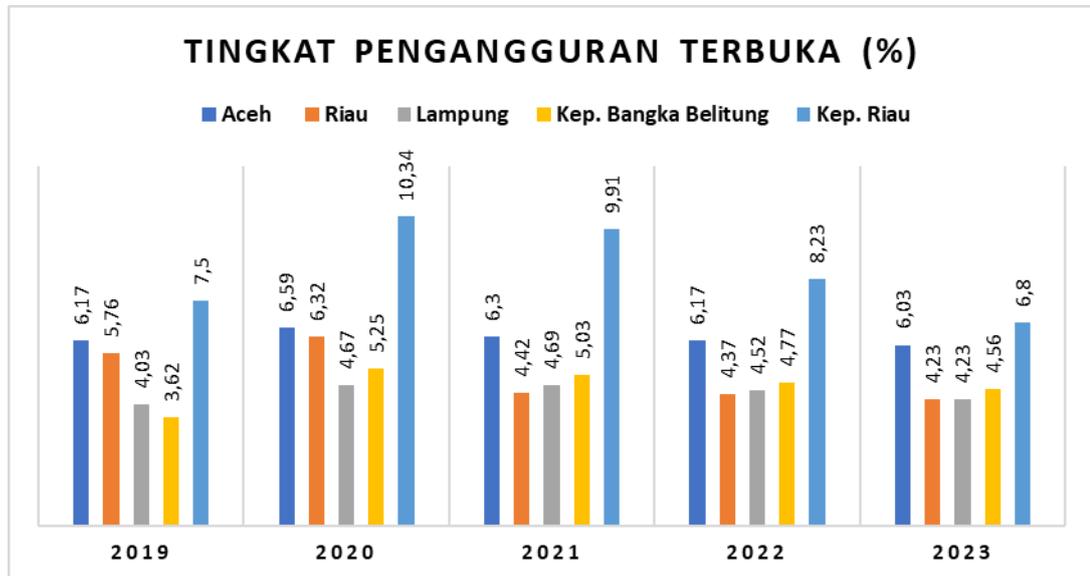
disebabkan oleh faktor infrastruktur, dukungan kebijakan daerah, investasi, serta tingkat literasi digital masyarakat setempat.

Selain Indeks Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi, pengangguran juga merupakan salah satu hambatan yang bisa menghalangi pertumbuhan ekonomi. Pengangguran merupakan situasi yang menunjukkan seseorang yang memiliki keinginan bisa mendapatkan pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya (Aminda *et al.*, 2024). Pengangguran merupakan isu yang tidak mudah untuk ditolak oleh setiap wilayah, dan mampu memicu masalah sosial seperti tidak menurunnya angka kriminalitas justru meningkat serta masalah ekonomi lainnya. Keadaan ini mampu menciptakan turunnya kesejahteraan serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu semakin tidak tinggi angka tingkat pengangguran, maka akan sejahtera kehidupan suatu masyarakat di negara atau daerah namun jika semakin meningkat tingkat pengangguran maka semakin menurun pula kesejahteraan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah (Kalsum, 2017).

Masalah pengangguran masih menjadi masalah besar terutama di negara berkembang disebabkan karena ketersediaan lapangan kerja yang sedikit sementara jumlah penduduk bertambah setiap tahunnya maka dari itu jumlah angkatan kerja meningkat. Apabila semakin meningkat angka pengangguran, kondisi ini akan berdampak tidak baik, karena masalah ini bisa mengakibatkan sebagian besar rumah tangga tidak mampu mencukupi keperluan konsumsi karena tidak mempunyai pekerjaan serta penghasilan hal ini merupakan dampak buruk pengangguran bagi suatu negara (Himo *et al.*, 2022).

Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Nurul Anisa Putri, dkk (2023) bahwa temuannya mengenai pengangguran terdapat dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tapi berbeda pada kajian yang dikerjakan oleh Lidyawati Padang dan Murtala (2019) hasil temuannya mengenai pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan kondisi ini berarti pengangguran yang tinggi dapat memperlambat perekonomian suatu negara atau daerah.

Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

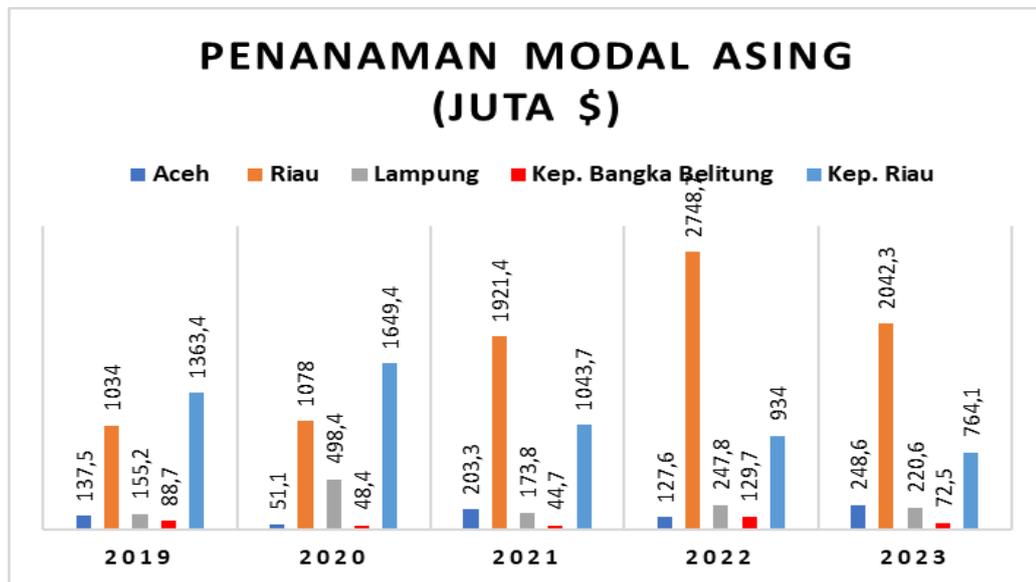
Gambar 1.4 menampilkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di lima provinsi wilayah Sumatera, yaitu Aceh, Riau, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau (Kepri) selama periode 2019 hingga 2023. Grafik ini menggambarkan kondisi fluktuatif tingkat pengangguran di masing-masing provinsi, yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi regional maupun nasional.

Selama periode tersebut, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat TPT tertinggi, terutama pada tahun 2020 sebesar 10,34%, yang merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 terhadap sektor industri dan ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Setelah itu, TPT Kepri mengalami penurunan bertahap, namun tetap berada pada angka yang relatif tinggi, yakni 6,8% pada tahun 2023. Sementara itu, provinsi lain seperti Lampung dan Bangka Belitung mencatatkan tingkat pengangguran yang lebih rendah dan relatif stabil, berkisar antara 4% hingga 5%. Provinsi Aceh, meskipun sempat mencatatkan angka tinggi, seperti 9,31% pada 2021, menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Tahun 2020 secara umum menjadi titik tertinggi TPT di hampir semua provinsi akibat terganggunya aktivitas ekonomi. Tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan proses pemulihan ekonomi yang mulai berjalan, meskipun belum merata di semua wilayah.

Salah satu faktor penentu yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu investasi (Todaro, 2011). Investasi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, memiliki peranan yang strategis untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Asrinda & Setiawati, 2022). Investasi, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, “Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merujuk pada pemanfaatan harta masyarakat Indonesia, termasuk seluruh hak dan aset yang dimiliki oleh negara, perusahaan swasta nasional, maupun individu asing yang berdomisili di Indonesia”. Sementara itu, investasi langsung (*Direct Investment*) menjadi salah satu bentuk aliran modal asing yang masuk ke sektor swasta disebut Penanaman Modal Asing (PMA) (Albasyari & Priyadi, 2024). PMDN mencerminkan kontribusi domestik terhadap pembangunan ekonomi melalui aktivitas investasi oleh pelaku usaha lokal, sedangkan PMA menggambarkan masuknya modal asing yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui transfer teknologi, penyediaan pekerjaan, dan peningkatan daya saing. Ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan fluktuasi dalam aliran investasi dari kedua jenis modal tersebut. Penurunan investasi akibat ketidakpastian global, seperti pandemi, dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi di daerah (Todaro, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kania Azzahra & Soebagy, (2024) investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan dengan artian ketika investasi terjadi kenaikan 1% maka pertumbuhan ekonomi juga akan menaikkan 1% sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Riyadi & Woyanti, 2022) Investasi memiliki dampak negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa setiap naiknya angka investasi sebesar 1% justru menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai peranan investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, berikut ini disajikan data investasi pada periode tertentu lima provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Gambar 1. 5 Grafik Investasi Penanaman Modal Asing 2019-2023



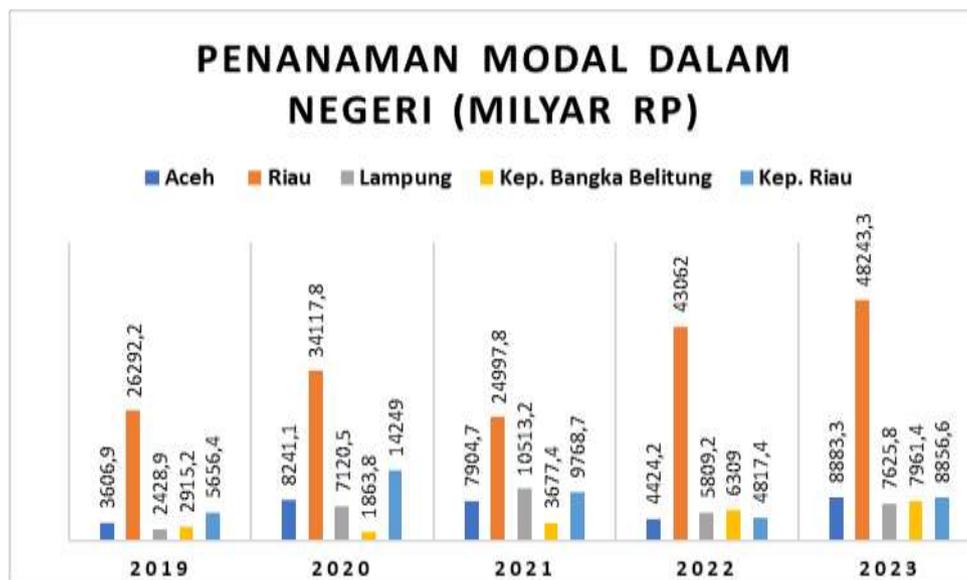
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1.5 menunjukkan perkembangan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) di lima provinsi, yaitu Aceh, Riau, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau (Kepri) selama periode 2019 hingga 2023. Grafik ini menggambarkan fluktuasi tingkat ketertarikan investor asing terhadap masing-masing wilayah dari tahun ke tahun. Secara umum, Provinsi Riau consistently mencatat nilai PMA tertinggi dibandingkan keempat provinsi lainnya dalam lima tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, ketika PMA di Riau mencapai 2.748,6 juta dolar, menunjukkan daya tarik investasi yang sangat kuat, kemungkinan didorong oleh sektor industri pengolahan dan energi. Meskipun pada 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 2.024,3 juta dolar, nilai tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain.

Sementara itu, Kepulauan Riau menempati posisi kedua dalam hal nilai PMA, dengan angka tertinggi pada tahun 2023 sebesar 764,1 juta dolar. Provinsi ini dikenal memiliki kawasan industri dan pelabuhan bebas seperti Batam dan Bintan yang strategis bagi investasi asing. Provinsi Lampung, Aceh, dan Bangka Belitung menunjukkan nilai PMA yang relatif rendah dan cenderung fluktuatif. Lampung sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun menurun kembali pada tahun-tahun berikutnya. Aceh dan Bangka Belitung mencatat nilai

yang paling rendah sepanjang periode, dengan kontribusi yang kecil terhadap total PMA kawasan. Tren ini mengindikasikan bahwa distribusi investasi asing belum merata, dan masih terkonsentrasi di provinsi-provinsi dengan infrastruktur yang lebih baik, kemudahan berusaha, serta sektor unggulan yang menarik bagi investor luar negeri.

Gambar 1.6 Penanaman Modal Dalam Negeri 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar tersebut menunjukkan perkembangan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di lima provinsi, yaitu Aceh, Riau, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau (Kepri) selama periode 2019 hingga 2023. Grafik ini mengilustrasikan perbedaan kontribusi investor domestik terhadap perekonomian regional. Sepanjang periode tersebut, Provinsi Riau secara konsisten mencatat nilai PMDN tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan realisasi PMDN mencapai 43.062 miliar rupiah, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 48.213,3 miliar rupiah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap iklim investasi di Riau, kemungkinan besar karena ketersediaan infrastruktur, sektor industri pengolahan, serta kebijakan daerah yang mendukung. Sementara itu, Aceh, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan nilai PMDN yang relatif lebih rendah dan fluktuatif. Aceh menunjukkan peningkatan

bertahap, dengan PMDN tertinggi pada tahun 2023 sebesar 8.883,3 miliar rupiah. Lampung juga mengalami tren kenaikan moderat, sedangkan Bangka Belitung mencatat nilai paling rendah di antara kelima provinsi sepanjang lima tahun terakhir. Kepulauan Riau menempati posisi menengah, dengan nilai PMDN yang stabil dan cenderung meningkat, mencapai 8.856,6 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya potensi pertumbuhan di sektor-sektor tertentu seperti industri manufaktur dan pariwisata yang mulai berkembang.

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), tingkat pengangguran, serta investasi (baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing) merupakan faktor-faktor yang diduga memiliki keterkaitan erat terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di lima provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi determinan utama yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Atas dasar hal tersebut, penulis memilih topik penelitian dengan judul... **“DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU SUMATERA DENGAN PENDEKATAN PANEL VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (PVECM) (Studi Kasus: Lima Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Terendah)”**. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antar variabel serta menjadi masukan dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan merata di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), tingkat pengangguran, investasi PMA dan investasi PMDN di lima Provinsi di Pulau Sumatera 2012- 2023?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), tingkat pengangguran, investasi PMA dan investasi

PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi di lima provinsi di Pulau Sumatera dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), tingkat pengangguran, investasi PMA dan investasi PMDN di lima provinsi di Pulau Sumatera 2012- 2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), tingkat pengangguran, investasi PMA dan investasi PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi di lima provinsi di Pulau Sumatera dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan fenomena permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, manfaat dari studi ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini ditargetkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang memiliki dampak terbesar terhadap perkembangan ekonomi di lima provinsi di Pulau Sumatera.
 - b. Penelitian ini ditargetkan dapat menjadi acuan serta sumber pengetahuan baru bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis

Temuan dari studi ini ditargetkan dapat berperan sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat guna dalam upaya menaikkan pertumbuhan ekonomi di lima provinsi di Pulau Sumatera. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan strategi pembangunan yang berkelanjutan serta mendukung pengambilan keputusan untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi.